

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laba merupakan indeks yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan dan dijadikan sebagai panduan dalam mengambil keputusan, juga menjadi perhatian oleh para *stakeholder*. Laba mempunyai kapasitas informasi yang sangat penting kepada pihak internal maupun eksternal pada suatu perusahaan karena laba merupakan hasil dari pendapatan dikurangi biaya. Kinerja keuangan perusahaan yang baik merupakan cerminan dari laba yang tinggi. Maka karena itu untuk memperoleh penilaian yang baik, sehingga untuk melakukan manajemen laba akan semakin besar.

Fenomena yang berkaitan dengan manajemen laba sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dilaporkan pada laporan keuangan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 mengalami keuntungan dengan mencetak laba bersih sebesar US\$ 809,4 ribu. Hal ini mengejutkan karena seharusnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian. Dalam beberapa tahun terakhir memang perusahaan terus mengalami kerugian, selama sepanjang sembilan bulan pertama 2018 tercatat perusahaan mengalami kerugian sebesar US\$ 114,08 juta. Kerugian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar US\$ 223,03 juta. Namun secara mengejutkan pada akhir tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melaporkan bahwa mengalami keuntungan bukannya

rugi. Hal ini membuat dua komisaris dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria tidak bersedia untuk menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018. Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08% saham Garuda. Kedua komisaris ini tidak sepakat dengan hasil kerjasama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Mahata Aero yang diakui sebagai pendapatan oleh manajemen, padahal pihak PT Mahata Aero belum membayar satu sen pun dari total kompensasi yang disepakati sebesar US\$ 239,94 juta kepada pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk namun pihak manajemen telah mengakui sebagai pendapatan. Kejanggalaan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diungkapkan oleh Chairul Tanjung dan Dony Oskaria melalui surat yang dikirim saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), namun surat tersebut tidak mengubah sikap manajemen dengan dalih bahwa laporan keuangan tersebut telah menjalani proses audit. Hal ini menggambarkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan manajemen laba agar laporan keuangan terlihat baik. (cnnindonesia.com, 24 April 2019).

Fenomena kedua yaitu pada PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) terbukti melakukan kecurangan dengan mencatat rugi bersih pada laporan keuangan 2017 sebesar 551,9 miliar. Setelah dilakukan restatement, PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) pada laporan keuangan hasilnya PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) rugi 5,23 triliun jauh lebih besar dari versi sebelumnya yang hanya rugi 551,9 miliar (CNBC, 23 Maret 2019). Dari kasus tersebut PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA)

terbukti melakukan manajemen laba, dimana perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan membuat rugi bersih perusahaan terlihat lebih kecil daripada rugi yang sebenarnya untuk menjaga nilai perusahaan agar tidak jatuh dimata investor.

Banyak terjadi kasus-kasus yang belum terungkap ke publik tentang Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Berhubungan dengan kasus manajemen laba yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) peneliti tertarik meneliti tentang manajemen laba.

Pembedaan antara pemilik (*principal*) dan kepentingan manajemen (*agent*) mempunyai sisi negatif, keleluasan manajemen untuk memaksimalkan laba tentu mengarah terhadap proses memaksimalkan kepentingan manajemen itu sendiri dengan biaya yang bakal ditanggung oleh pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan ini semakin meningkat, karena *principal* tidak mempunyai informasi mengenai aktivitas keseharian manajemen untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemilik.

Menurut Siallagan Hamonangan (2020) : “Manajemen Laba adalah campuran tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.”

Untuk mengukur manajemen laba dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *discretionary accrual* karena pendekatan *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang dihasilkan oleh penanganan manajer atas laba. Dalam beberapa perubahan aktivitas setiap tahunnya *discretionary accrual* juga

menyajikan total akrual dan *nondiscretionary accrual*. Akrual diskresioner diobservasi melalui tahap total akrual maupun non discretionary accrual yang berarti akrual diskresioner tidak bisa diobservasi secara langsung dari laporan keuangan.

Kondisi terjadinya tindakan manajemen laba tidak dapat dipungkiri, pemilik (*shareholders*) tidak lagi dapat mengendalikan usahanya secara langsung akibat semakin besar dan luasnya usaha yang harus dikelola oleh pemiliknya. Pemisahan kekuasaan dan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), yang diakibatkan oleh pemberian wewenang kepada manajemen, akan menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*). (Harefa, 2019)

Masalah keagenan tersebut diakibatkan dari sifat oportunistik manajemen (*agent*), yang lebih mengutamakan kesejahteraannya daripada tujuan *prinsipal*. Manajemen (*agent*) menganggap keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja (*performance*) perusahaan sebagai hasil dari kinerja mereka sendiri daripada masukan yang signifikan dari pihak lain, salah satunya adalah pemilik. Beberapa ahli berpendapat bahwa keberadaan agen dan prinsipal merupakan salah satu unsur yang menjadi landasan berkembangnya teori keagenan. Ketidakseimbangan informasi antara prinsipal (*owner*) dan agen (*manajer*) menjadi pemicu masalah ini. Untuk memberikan kesempatan kepada agen untuk mengalami pengalaman mengelola pendapatan mereka, pengawasan operasional perusahaan terhadap agennya diberikan wewenang penuh oleh prinsipal. Adanya *asymmetric information* memberikan peluang bagi manajemen untuk menerapkan strategi manajemen laba. (Harefa, 2019)

Penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah Manajemen Laba yang berlebihan. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu faktor untuk meyakinkan para pengguna informasi keuangan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran (fraud). Struktur *Corporate Governance* yang efektif dapat mengurangi manajemen laba. (Pratiwi, dkk 2016) pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya *Good Corporate Governance*. Pada perusahaan publik, khususnya yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dampak dari tatakelola perusahaan yang sangat baik dapat dilihat pada pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Hal ini didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam Peraturan ini secara jelas disebutkan dalam poin 1 bagian (b) bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah organisasi pengawas yang berada di bawah Dewan Komisaris. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai misi membantu Dewan Komisaris dalam mengukur efektivitas operasinya dan melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pembentukan komite audit sangat penting untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan. Selain itu, Bapepam menggarisbawahi pentingnya Dewan Komisaris memiliki Komite Audit untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan.

Peran komite audit kerap kali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan sebab dapat membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Ukuran Komite Audit merupakan Jumlah seluruh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Komite Audit dan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menangani masalah perusahaan sangat berkaitan erat. Dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2021 poin (2) mengemukakan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota Komite Audit adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit yang dicantumkan dalam laporan perusahaan, besar kecilnya Komite Audit ditentukan dengan menggunakan skala rasio.

Independensi komite audit merupakan jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan. Independensi Komite Audit dapat dilihat dari seberapa banyak anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan. Dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2012 point (3) mengemukakan bahwa “Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite

Audit”. Dari UU tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggota Komite Audit yang sudah dibentuk oleh Dewan Komisaris dikatakan independen karena di dalam anggota Komite Audit tersebut diperankan oleh sekurang-kurangnya satu orang dari Komisaris Independen (Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki saham secara langsung pada perusahaan) dan yang lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik. Skala rasio digunakan untuk mengukur Independensi Komite Audit. Kualitas pelaporan yang baik merupakan hasil dari tingginya independensi Komite Audit sehingga tindakan manajemen untuk mengutamakan kepentingan manajemen akan semakin kecil.

Jumlah Rapat Komite Audit merupakan jumlah rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 mengemukakan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit adalah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Frekuensi Pertemuan Komite Audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam periode satu tahun. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas Audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.

Penelitian mengenai Karakteristik Komite Audit telah banyak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian Widijayal, Joelyn Veronica (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan independensi komite audit dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian Ria Karina (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit, keahlian komite audit rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Margareth A.R. Sihombing, Hery Laksito (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan masa jabatan ketua komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian diatas menunjukkan adanya ketidak konsistenan hasil temuan penelitian mengenai manajemen laba. Dimana terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan hasil penelitian antar peneliti-peneliti terdahulu kemungkinan disebabkan oleh perbedaan perusahaan yang menjadi sampel dan periode tahun penggunaan data dalam setiap penelitian. Karena perbedaan ini, peneliti tertarik untuk meneliti kembali seberapa besar pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Adapun objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *Annual Report* perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia sebagai objek penelitian, karena peneliti melihat bahwa beberapa perusahaan industri tersebut menyajikan presentase kenaikan dan penurunan laba setiap tahunnya yang signifikan. Oleh

karena itu, peneliti ingin menguji apakah kenaikan dan penurunan laba yang signifikan sesuai dengan fakta yang ada dan tanpa adanya benturan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungannya melalui tindakan Manajemen Laba, dilihat dari aspek karakteristik Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, antara lain :

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, diberikan batasan-batasan masalah agar penelitian tidak terlalu luas cakupan bahasannya serta dapat mencapai tujuan.

1. Penelitian ini Memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen karakteristik komite audit, variabel dependen yaitu manajemen laba.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Periode penelitian yang digunakan dari tahun 2018-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Untuk menegetahui apakah Jumlah Rapat komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, diharapkan bisa memberi manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pemahaman mengenai Pengaruh Karakteristik yang ada pada Komite Audit yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat dalam memahami Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba.

3. Bagi Pembaca

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan dalam karya ilmiah tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Penelitian mengenai komite audit ini dilandasi oleh *agency theory* (teori agensi). Teori keagenan menjelaskan dan memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan.

Menurut Meckling dalam jurnal Wardoyo, dkk (2022): “Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Silaban and Harefa (2020) : “Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer dengan pemilik.”

Dalam *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan karena pihak-pihak yang terkait yaitu *principal* (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan *agent* (yang menerima kontrak dan yang mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal*.

Masalah keagenan akan muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah. Manajer yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak terbaik untuk kepentingan pemilik, karena adanya perbandingan kepentingan (*conflict of interest*).

Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self-interested behaviour*. Keinginan, motivasi, dan kepentingan yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi .

Akibat perbedaan kepentingan inilah, masing-masing pihak (Prinsipal dan Agen) berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi, yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham

yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi *agent* berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi tingkat laba, harga saham dan tingkat pengembalian deviden juga akan semakin tinggi pula. Pada kondisi ini, maka *agent* dianggap berhasil dan berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya, *agent* pun memenuhi tuntutan *principal* agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka *agent* dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bias terjadi atas prakarsa dari *principal* ataupun inisiatif *agent* sendiri. Maka terjadilah akuntansi yang menyalahi aturan seperti adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan, kapitalisasi biaya yang tidak semestinya atau pengakuan penjualan yang tidak semestinya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun, perusahaan kelihatannya meraih keuntungan, padahal kenyataannya rugi.

2.2 Good Corporate Governance (GCG)

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Silaban and Harefa (2021) :

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan agar

agent bertindak dalam pengelolaan perusahaan sehingga perusahaan mampu memiliki kualitas laba yang tinggi yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur atas laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga kualitas laporan keuangan akan dinilai dengan baik oleh investor ataupun kreditur.

Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah serangkaian proses, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola ini mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah Pemegang Saham, Manajemen, dan Dewan Direksi serta pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Eko Sudarmanto (2021) Setiap perusahaan harus memastikan bahwa azas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Sehubungan dengan itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola perusahaan untuk menjalankan keterbukaan dalam penyampaian informasi sebagai alat pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti, bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola perusahaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas Adalah prinsip tanggung jawab dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan azas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara Independen yang bersifat professional, mandiri, serta bebas dari konflik kepentingan dan tekanan dari manapun, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya operasionalnya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensi yaitu: dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi spiritual.(Sari 2018)

Untuk mencegah terjadinya tindakan Manajemen Laba yang berlebihan, penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat membantu para pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran (*fraud*). Struktur *Corporate Governance* yang baik dapat mengurangi praktik Manajemen Laba yang dilakukan oleh manajemen. *Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.(Pratiwi,dkk 2016) Dampak dari *Good Corporate Governance* ini dapat dilihat melalui pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan terutama pada perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Secara umum, Manajemen Laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Menurut Siallagan Hamonangan (2020) : “Manajemen Laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.”

Ada 2 perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunistik. Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat yang mendorong terjadinya Manajemen Laba. Artinya, Manajemen Laba sebenarnya merupakan upaya oportunistik seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya. Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada.

Manajemen Laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*Accounting games*). Apalagi, jika melihat bahwa rekayasa ini merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka-angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi itu. Ada 2 alasan yang dapat menjelaskan

mengapa laporan keuangan rawan untuk dipermainkan oleh siapapun yang menyusun informasi itu. Alasan pertama adalah, hanya dengan memahami dan menguasai konsep-konsep akuntansi dan keuangan seseorang dapat mempermainkan informasi keuangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Alasan kedua adalah, kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi ini secara tidak langsung membuat Standar Akuntansi seakan-akan mengakomodasi atau memfasilitasi aktivitas rekayasa manjerial ini.

2.3.2 Motivati dalam Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2017), terdapat beberapa alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management* atau manajemen laba, antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi Pasar Modal

Faktor yang mempengaruhi studi pasar modal adalah perkembangan pasar modal itu sendiri. Perkembangan pasar modal ini sebenarnya merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha. Saat ini, dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dunia usaha tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan dan operasional dan investasi, namun lebih menyukai dana yang diperoleh dari pasar modal.

2. Penawaran Saham Perdana

Penawaran saham perdana atau *initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik. Hal inilah yang membuat pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam perusahaan. Artinya, pemilik dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan seorang diri sekaligus harus menanggung resiko yang kemungkinan muncul.

3. Motivasi Kontraktual

Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul seandainya setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya, permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi kepentingan pihak lain. Permasalahan inilah yang memicu konflik kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan.

4. Motivasi Regulasi

Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Sebaliknya, pemerintah mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Sedangkan hak yang akan diterima perusahaan berupa rasa aman dan pelayanan publik dalam menjalankan usahanya.

Di samping itu, manajemen laba khususnya dalam pola perataan laba juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan informasi privat

(*private information*) perusahaan. Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang lain, misalnya dalam rangka mendapatkan bonus berbasis laba, menghindari pelanggaran kontrak utang, dan menghindari biaya politis (*political cost*) pada waktu perusahaan mendapatkan laba yang tinggi.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Menurut Siregar, dkk (2005) dalam jurnal Faradila and Cahyati (2013) terdapat empat bentuk dari manajemen

laba, yaitu:

1. Tindakan Kepala Basah (*taking a big bath*)

dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan.

2. Meminimumkan Laba (*income minimation*)

dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebasan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya.

3. Memaksimumkan Laba (*income maximization*)

memaksimumkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak utang jangka pendek, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimumkan laba.

4. Perataan Laba (*income smoothing*)

Perataan Laba (*income smoothing*) merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

2.3.4 Discretionary Accrual

Salah satu pengukuran Manajemen Laba adalah dengan menggunakan pendekatan model modifikasi Jones. Jones mengembangkan model *earning management* dengan membagi total akrual perusahaan dengan tingkat akrual yang abnormal atau (*Discretionary Accrual*). *Discretionary Accrual* adalah bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh pihak manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi. *Discretionary Accrual* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual. (Septirianti 2013)

Manajemen Laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini, pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals*.

Manajemen laba melalui *discretionary accruals* sering terjadi pada perusahaan-perusahaan berskala besar dengan membuat rugi bersih perusahaan terlihat lebih kecil daripada rugi sebenarnya. Salah satunya pada tahun 2017, PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA), terbukti memanipulasi laporan keuangannya dengan membuat rugi bersih perusahaan terlihat lebih kecil daripada rugi sebenarnya untuk menjaga nilai perusahaan agar tidak jatuh dimata investor.

Pengukuran Manajemen Laba dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Discretionary Accrual (DA)*. Penggunaan pendekatan *Discretionary Accrual (DA)* sebagai alat ukur Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* dapat dilakukan dengan persamaan berikut :

$$DAC_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Sumber: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/4458>

2.4 Komite Audit

2.4.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 dalam jurnal Priya (2017) menyatakan bahwa : “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi.”

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu

mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Komite Audit

2.4.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa : Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan publik; dan

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2.4.2.2 Wewenang Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa : “Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

2.4.3 Syarat–Syarat Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa Persyaratan keanggotaan Komite Audit antara lain, sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai :
 - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama emiten atau perusahaan publik ; dan atau
 - b) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.4.4 Karakteristik Komite Audit Dan Hubungannya Dengan Manajemen Laba

Adapun karakteristik Komite Audit dan hubungannya dengan manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dalam (Komisioner and Jasa 2015) Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Bab II pasal (4) menyebutkan bahwa : “Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”. Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggungjawab pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen puncak.

Dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Selain dapat meningkatkan fungsi pengawasan, ukuran komite audit yang besar juga akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan semakin lebih terjamin. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Ukuran Komite Audit dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{ACSIZE} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Sumber : <https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383>

2. Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit diperlukan dalam monitoring manajemen laba. Peran monitoring akan semakin kuat dengan keterlibatan auditor yang berkualitas. Komite audit independen adalah jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan. Dalam keputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004, dinyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Independensi Komite Audit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ACINDP} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

Sumber : <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175>

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Karakteristik komite audit berikutnya adalah frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan, akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam POJK No.55/POJK-04/2015 menyebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingan sendiri. Semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat meminimalisasi manajemen laba. Frekuensi Komite Audit diukur dengan rumus sebagai berikut:

ACMEET = Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit dalam 1 Tahun
--

Sumber : <https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383>

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti dan akademisi sebelumnya telah melakukan sejumlah penelitian untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik

manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai variabel, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
1	Erna Widiastuty (2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Independensi Komite Audit, Financial Expertise, Jumlah Pertemuan Komite Audit,	Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit, financial expertise dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independen yaitu independensi dan jumlah pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Hendi, Septi Lisniati (2020)	Pengaruh Karakteristik Komite	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen	Variabel independensi komite audit,

		Audit Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	: Independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Ukuran Komite Audit.	keahlian komite audit, dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
3	Raisya Hayyu Mughni, Nur Cahyonowati (2015)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan IPO Di Indonesia Tahun 2011-2013)	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Ukuran Komite Audit, Jumlah Pertemuan Audit,	Variabel ukuran komite audit dan variabel jumlah pertemuan komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.
4	Novita Dwi Permatasari (2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Perusahaan Yang Listed Di Bei Pada Tahun 2011-2013)	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Audit	Independensi komite audit dapat mempengaruhi atau mengurangi tindakan praktik manajemen laba, sedangkan ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan audit tidak

				dapat mempengaruhi atau mengurangi tindakan praktik manajemen laba.
5	Anindyah Prastiti, Wahyu Meiranto (2013)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Ukuran Komite Audit, frekuensi Pertemuan komite audit, independensi komite audit	Variabel ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
6	Widijaya1, Joelyn Veronica (2022)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen :Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan independensi komite audit dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen

				laba.
7	Kadek Trisna Dwiyanti, Meyta Astriena (2018)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Komite Audit, Personil Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite Audit	Karakteristik komite audit yang di ukur dengan ukuran komite audit, personil komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
8	Ria Karina (2020)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Auditor Eksternal Terhadap Praktik Manajemen Laba Di Indonesia	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Rapat Komite Audit	Variabel ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
9	Margareth A. R. Sihombing, Herry Laksito (2017)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Masa Jabatan Ketua Komite Audit	Ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan masa jabatan ketua komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen

				laba.
10	Bella Robbika Puspa Sari (2018)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Umum Syariah Periode 2014-2016)	Variabel Dependen : Manajemen Laba Variabel Independen : Komite Audit, Jumlah Pertemuan Audit, Komite Audit Independen	komite audit, jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, dan komite audit independen berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba.

Sumber : Data olahan penelitian tahun 2013-2022

Sejalan dengan penelitian terdahulu di atas, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Novita Dwi Permatasari (2016) sebagai acuan dalam peneliti ini. Penulis ingin menguji kembali variabel mana yang berpengaruh atau tidak terhadap manajemen laba dengan periode tahun yang berbeda, yakni 2018-2021. Perbedaannya adalah, penelitian ini menjadikan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian. Hal ini dilakukan karena berdasarkan data laporan data laporan tahunan, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tersebut menyajikan informasi perubahan laba yang mengalami kenaikan ataupun penurunan secara signifikan selama tahun 2018-2021.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian Novita Dwi Permatasari (2016), penulis ini diperkuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang komite audit.

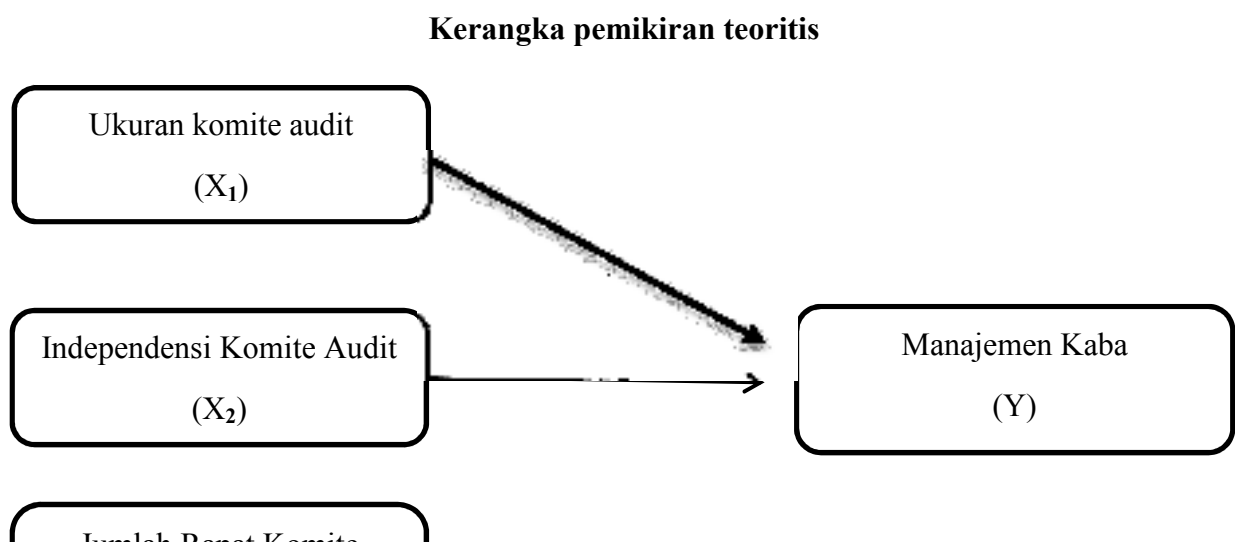
2.6 Rerangka Tioritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Rerangka Teoritis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam pembentukan kerangka berpikir, peneliti menggunakan model Analisis Regresi Berganda. Analisa ini merupakan analisis linear yang digunakan dengan jumlah variabel independen lebih dari 2 (dua) variabel.

Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran komite audit, independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit, sedangkan variabel Dependen adalah Manajemen Laba. Kerangka pemikiran mengenai hubungan agar variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.7 Hipotesis Penelitian



2.6.2 Pengembangan Hipotesis

Menurut Abdullah (2015) dalam jurnal Yam, Taufik (2021) : “hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian”. Perumusan hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hubungan antara Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba yaitu Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit.

1. Ukura Komite Audit (X_1) Dan Manajemen Laba

Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-L K Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam jurnal Partono and Purwanto, (2015)

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga disebutkan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten. Hal ini dikarenakan dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada pihak manajemen, yang diharapkan akan menurunkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen.

Sihombing and Laksito (2017), dalam penelitiannya membuktikan bahwa hubungan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang tepat dan efektif akan menghasilkan kinerja komite audit yang baik.

Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual* dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi $< 5\%$ atau 0.05, dengan kata lain ukuran komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2. Hubungan Independensi Komite Audit (X₂) dan Manajemen Laba (Y)

Menurut Dwikusumowati and Rahardjo, (2013) Independensi Komite Audit merupakan syarat utama anggota Audit. Anggota komite audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba.

Prastiti and Meiranto (2013), dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen

laba. Karena semakin persentase anggota independen maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Untuk menguji hubungan antara independensi komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi $< 5\%$ atau 0.05, dengan kata lain independensi komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

3. Jumlah Rapat Komite Audit (X₃) dan Manajemen Laba

Dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan, independensi yang baik akan semakin lengkap dan efektif. Dengan semakin seringnya jumlah pertemuan yang diadakan, komite audit akan lebih efektif memantau manajemen agar tidak berusaha melakukan kepentingan sendiri. Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Atau dengan kata lain, Jumlah Rapat komite audit adalah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun.

Widiastuty (2016), dalam penelitiannya membuktikan bahwa hubungan frekuensi pertemuan audit berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat meminimalisasi manajemen laba

Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi $< 5\%$ atau 0.05, dengan kata lain frekuensi pertemuan komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitiannya atau identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2019) :

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian berupa orang, objek, dan sebagainya sehingga objek ini bisa menjadi sumber data penelitian.

Menurut Serlince, dkk (2022) : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu.” Populasi

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2021. Jumlah populasi adalah 63 perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2007) dalam (Dr. Drs. Ngatno 2015) : “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Metode pengambilan data yang dilakukan adalah metode purposive sampling (pemilihan sampel berdasarkan tujuan), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak tetapi menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria yang ditentukan dalam hal pengambilan sampel dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2021.
2. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 31 Desember 2018-2021.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian periode tahun 2018-2021
4. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas, maka sampel penelitian sebanyak perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia	63
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel	30
Perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel	33

Sumber : www.idx.co.id

Tabel 3.2
Nama-Nama Sampel Perusahaan

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
5	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk
6	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
7	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
8	CAKK	Cahyaputra Asa Keramik Tbk
9	TOTO	Surya Toto Indoensia
10	ALKA	Alaskan Industrindo Tbk
11	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk
12	INAI	Indal Alumunium Industry Tbk
13	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
14	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
15	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
16	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
17	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk

18	EKAD	Ekadharna International Tb
19	INCI	Intan Wijaya International Tbk
20	MDKI	Emdeki Utama Tbk
21	MOLI	Madusari Murni Indah
22	SRSN	Indo Acitama Tbk
23	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
24	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk
25	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
26	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk
27	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
28	IMPC	ImpackPratama Industri Tbk
29	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
30	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
31	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk
32	TALF	Tunas Alfin Tbk
33	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Sumber : : www.idx.co.id 3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder biasanya berupa, catatan, bukti yang telah ada, ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan Indonesia pada tahun 2018-2021. Data sekunder ini diperoleh dari situs resmi BEI, www.idx.co.id

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data/menghimpun informasi kemudian mempelajari informasi tersebut berupa laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dengan mengunduh data laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, serta studi pustaka dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan teori-teori yang melatarbelakangi penelitian.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (Variabel Independen) dan Variabel Terikat (variabel dependen).

a) Variabel Dependen

Menurut (Sahir 2021) Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh Variabel Independen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Pengukuran Manajemen Laba dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Discretionary Accrual (DA)*. Penggunaan pendekatan *Discretionary*

Accrual (DA) sebagai alat ukur Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Untuk mendapatkan nilai *Discretionary Accrual* dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai *Total Accrual (TAC)*

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Sumber : <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175>

Keterangan :

- a) TAC_{it} = *Total accrual* perusahaan i pada periode t
- b) N_{it} = Laba bersih perusahaan (net income) perusahaan i pada periode t.
- c) CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan (*Cash Flow From Operating Activities*) perusahaan i pada periode t.

2. Nilai *Total Accrual (TAC)* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\frac{TA_{it}}{A_{it-1}}\right) = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right) + \epsilon$$

Sumber : <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175>

Keterangan :

- a) TA_{it} = *Total Accrual* Perusahaan i pada periode t.
- b) A_{it-1} = Total Aset perusahaan i pada periode t
- c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan I antara periode dan periode t-1

d) PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i pada periode t.

3. Menghitung nilai *Nondiscretionary Accruals* (NDA) :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it} - 1} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it} - 1} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it} - 1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1} \right)$$

Sumber : <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175>

Keterangan :

- a) NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t
- b) A_{it} = Total Aset perusahaan i pada periode t
- c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan I antara periode dan periode t-1
- d) ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dengan periode t-1
- e) PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i dengan periode t

4. Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* dengan persamaan berikut

$$DAC_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Sumber : <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/6->

ErnawatiWidiastuty.pdf

Keterangan :

- a) DAC_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t
- b) A_{it} = Total Aset perusahaan i pada periode t
- c) TA_{it} = *Total Accrual* Perusahaan i pada periode t.

d) NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t.

b. Variabel Independen

Variabel independen (Variabel terikat) adalah tipe variabel yang mempengaruhi Variabel bebas (Variabel Independen). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit.

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Karakteristik komite audit terdapat beberapa dalam pengukurannya yaitu:

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menggunakan indikator ukuran komite audit (jumlah absolut) yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan perusahaan tersebut. Di dalam keputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota Komite Audit adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Ukuran Komite Audit dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$ACSIZE = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Sumber : <https://jman-upiyptk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383>

2. Independensi Komite Audit

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan persentasi antara anggota independen menurut ketentuan BAPEPAM terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.(Widiastuty 2016)

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM maka independensi komite audit (ACINDP) diperoleh dari perhitungan:

$$ACINDP = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

Sumber : <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175>

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit adalah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Frekuensi Komite Audit diukur dengan

skala rasio yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam periode satu tahun.

ACMEET = Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit dalam 1 Tahun

Sumber : <https://jman-upiyptk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383>

Tabel 3.3

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
----	----------	----------	------------	-------

1	<p>Manajemen Laba (Y)</p> <p>Sumber : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accouting/article/view/4458</p>	<p>Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui <i>stakeholders</i> yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.</p>	$\frac{DAC_{it}}{TA_{it}} = \frac{A_{it-1}}{NDA_{it}}$	Rasio
2	<p>Ukuran Komite Audit (X₁)</p> <p>Sumber : https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383</p>	<p>Jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan.</p>	<p>ACSIZE = Jumlah Komite Audit</p>	Rasio
2	<p>Independensi Komite Audit (X₂)</p> <p>Sumber : http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4175</p>	<p>Seberapa banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan.</p>	<p>ACINDP = Jumlah Komite Audit Independen / Jumlah Anggota Komite Audit</p>	Rasio
4	<p>Frekuensi Komite Audit (X₃)</p> <p>Sumber : https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/383</p>	<p>Jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun.</p>	<p>ACMEET = Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit dalam 1 Tahun</p>	Rasio

3.7 Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer, yaitu *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Versi 22. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dalam menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolenieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah dengan

menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H₁ : Data residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai signifikansi lebih besar 5%, maka H₀ diterima berarti data residual berdistribusi normal, ataupun sebaliknya.

3.7.2.2 Uji Multikolenieritas

Uji ini digunakan untuk situasi dimana adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antar variabel-variabel tersebut, berarti terjadi problem multikolinearitas. Sedangkan variabel yang baik adalah variabel yang tidak memiliki problem multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian tersebut.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain Uji *Park*, Uji *Glejser*, *Scatterplot*, dan Uji Koefisien Korelasi *Spearman*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Uji Heterodastisitas dengan uji *Glejser*, yaitu metode yang digunakan dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (Lne^2) dengan variabel independen (x_1 dan x_2). Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak ada gejala Heterokedastisitas
2. H_a : Ada gejala Heterokedastisitas

H_0 diterima apabila Signifikansi $> 0,05$, berarti tidak terdapat gejala Heterokedastisitas dan H_0 ditolak bila Signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat gejala Heterokedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Pengujian asumsi uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Run test*. Apabila hasil Uji Autokorelasi yang didapat menunjukkan tingkat Signifikansi $< 0,05$ disimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi tersebut. Dan sebaliknya, apabila nilai Sig $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya gejala Autokorelasi pada model regresi.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis Regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Pada Penelitian ini, model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Sumber: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/1861>

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

α = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Ukuran Komite Audit

X_2 = Independensi Komite Audit

X_3 = Frekuensi Pertemuan Komite Audit

e = residual of error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji R^2 dilakukan dengan maksud untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Sehingga akan diketahui seberapa besar variabel bebas akan mampu dijelaskan oleh variabel terikat, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Apabila nilai Koefisien Determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila R^2 mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Parsial (*t*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila koefisien regresi signifikansi pada t -signifikan $\leq 0,05$ atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, t -signifikan $> 0,05$ atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

